Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya Bandung)

Pembimbing:
Wati Aris Astuti, SE., M.Si., Ak., CA

Oleh:
Adnesha Mutia
21113223

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax payer awareness and perceptions of taxation system toward the wilingness to pay tax individual tax payer in KPP Pratama Majalaya Bandung.

This study was a quantitative research that used primary data obtained through questionnaire distribution to 100 respondents who are individual tax payers in KPP Pratama Majalaya Bandung. To know the effect of tax payer awareness and perceptions of taxation system toward the wilingness to pay tax individual tax payer, this study used descriptive-verificative analysis technique. Data analysis method used is multiple regression with SPSS statistical software version 16.

The results showed that the variables of tax payer awareness have a significant effect toward the wilingness to pay tax individual tax payer. Similarly, the perceptions of taxation system have a sifnificant effect toward the wilingness to pay tax individual tax payer.

Keyword : Tax Payer Awareness, Perceptions, Efectiveness, Taxation System.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak (Reni Maesaroh, 2015). Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung, selain itu kemauan membayar pajak dibagi menjadi dua bagian (Reni Maesaroh, 2015).

Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah dari lima juta perusahaan atau badan usaha (besar, sedang dan kecil) hanya sekitar 11%-24% yang memiliki kemauan untuk membayar pajak (Tanza Erlambang, 2016). Melihat data tersebut, wajar apabila target pajak sebesar Rp. 1.294 triliun tahun 2015, hanya terealisasi sebesar Rp. 1.055 triliun dan negara kehilangan penghasilan sebesar Rp 239 triliun (Tanza Erlambang, 2016). Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan (Tanza Erlambang, 2016).

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan kesadaran membayar pajak untuk memenuhi segala kewajibannya perlu dibina kepada wajib pajak dalam hidup bermasyarakat (Wahid Nursalim, 2011). Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan, seandainya dalam pajak tersebut tidak ada frase yang bersifat memaksa (Herry Susanto, 2012). Sampai sekarang kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan (Herry Susanto, 2012).

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan manilai bahwa kesadaran penduduk Indonesia untuk membayar pajak masih rendah (Yuliardi Putro, 2015). Berdasarkan data, ada 44 juta penduduk Indonesia yang berada pada kelas menengah, hanya ada 27 juta penduduk yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 14 juta memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Yuliardi Putro, 2015). Dari jumlah tersebut, hanya 930 ribu jiwa warga yang mau membayar pajak terutang, akibat dari kesadaran wajib pajak masih rendah dalam hal membayar pajak, maka dana yang dapat digunakan pemerintah untuk membantu warga miskin juga tergolong rendah (Yuliardi Putro, 2015). Selain itu, kesadaran wajib pajak di Kabupaten Bandung untuk melaporkan jumlah pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT) terbilang rendah (Ghalih Huriarto, 2015). Dari jumlah wajib SPT sebanyak 276 ribu orang di Kabupaten Bandung, hanya 57% saja yang memiliki kemauan membayar pajak dan melakukan pelaporan (Ghalih Huriarto, 2015). Dilihat dari target penerimaan pajak di Kabupaten Bandung sekitar Rp 986 miliar. Jumlah tersebut berasal dari target KPP Pratama Soreang sebesar Rp 700 miliar dan target KPP Pratama Majalaya sebesar Rp 286 miliar (Ghalih Huriarto, 2015). Namun pada kenyataannya, KPP Pratama Majalaya hanya mampu merealisasikan penerimaan pajak Rp 254 miliar, jumlah tersebut sebenarnya bisa lebih besar, jika masyarakat semakin sadar melakukan pelaporan SPT (Ghalih Huriarto, 2015).

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perkembangan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mengenai peningkatan ketertiban administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional (Esra Aprilia Sormin, 2016). Berdasarkan hal tersebut diharapakan kemajuan teknologi di sistem perpajakan yang sekarang sudah ada seperti e-SPT, *e-filling*, e-NPWP, *e-registration*, *e-banking* dan *drop box* dan lain-lain dapat lebih sempurna serta memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam membayar atau melaporkan kewajiban perpajakan dan dapat memberikan pencitraan atau persepsi yang baik kepada hal yang terkait dengan pajak terutama pada sistem perpajakan (Esra Aprilia Sormin, 2016).

Namun, pada kenyataannya peneliti kebijakan ekonomi Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra menilai kemajuan teknologi informasi sistem perpajakan di Indonesia masih belum maksimal, hal itu membuat wajib pajak tidak memiliki kemauan membayar pajak (Suci Utami, 2015). Sebagai contoh pelaporan SPT Pajak Tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dengan wajib pajak karyawan (Suci Utami, 2015). Untuk wajib pajak karyawan memang tidak perlu dipusingkan dengan kemajuan sistem yang masih terbilang rumit, karena sudah diurusi oleh bagian keuangan perusahaan (Suci Utami, 2015). Sedangkan wajib pajak non karyawan, sistemnya rumit yang membuat wajib pajak malas membayar pajak karena masih banyak wajib pajak yang belum paham tentang penggunaan *e-filling* (Suci Utami, 2015).

Selain itu, alasan beberapa wajib pajak enggan menggunakan sistem *e-filling* karena masih ada dari kantor tempat wajib pajak bekerja yang menyerahkan SPT Tahunan secara manual, dan sosisalisasi *e-filling* belum gencar sehingga banyak yang belum mengetahui cara pelaporannya (Fiki Ariyanti, 2015). Ada juga yang masih khawatir menggunakan *e-filling* saat penyampaian SPT Tahunan dalam jumlah banyak (Fiki Ariyanti, 2015). Permasalahan utama adalah jika sewaktu-waktu internet mengalami *error*

atau *down* sehingga data tidak terekam, hilang dan justru tidak masuk di *database* Ditjen Pajak (Fiki Ariyanti, 2015). Atas gangguan tersebut, wajib pajak banyak menyampaikan keluhan melalui *call center* dan datang langsung ke kantor pajak, meskipun persoalan jaringan internet diluar kendali Ditjen Pajak, namun aparatur perpajakan secara langsung telah menyampaikan permohonan maaf kepada wajib pajak dan terus mengupayakan sebaik mungkin (Fiki Ariyanti, 2015).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak.
2) Seberapa besar pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1) Mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak.
2) Mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.1.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Pengertian kesadaran wajib pajak menurut beberapa ahli diantaranya menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:83) mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

"Kesadaran wajib pajak merupakan wajib pajak mau dengan sendirinya untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri seperti kewajiban penghitungan pajak, pembayaran pajak dan pelaporan pajak yang dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak".

Adinur Prasetyo (2016:87) mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

"Kesadaran wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak meliputi berbagai kegiatan, yakni menghitung, membayar, melaporkan pajak terutang dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang telah dilakukan".

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan wajib pajak mau dengan sendirinya melaksanakan kewajiban perpajakannya yang meliputi kegiatan seperti menghitung, membayar, melaporkan pajak terutang dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang telah dilakukan.

2.1.1.2 Faktor-Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Faktor-faktor kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari pengembangan konsep menurut Adinur Prasetyo (2016:87) sebagai berikut:

1) Wajib pajak menghitung jumlah pajak terutang.
2) Wajib pajak membayar jumlah pajak terutang.
3) Wajib pajak melaporkan jumlah pajak terutang.
4) Wajib pajak mempertanggungjawabkan penghitungan pajak.

2.1.2 Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Pengertian Persepsi menurut beberapa ahli diantaranya menurut Wibowo (2013:60) mendefinisikan persepsi sebagai berikut:

"Persepsi adalah suatu proses yang memungkinkan kita mengorganisir informasi dan menginterpretasikan kesan terhadap lingkungan sekitarnya".

Menurut Manahan Tampubolon (2012:65) mendefinisikan persepsi sebagai berikut:

"Persepsi adalah gambaran seseorang tentang suatu objek yang menjadi fokus permasalahan yang sedang dihadapi".

Pengertian Efektivitas menurut beberapa ahli diantaranya menurut Darsono dan Tjatjuk Siswandoko (2011:196) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:

"Efektivitas adalah seberapa baik tujuan yang dapat dicapai, merupakan prestasi yang dicapai dibandingkan dengan yang mungkin dicapai, dengan tetap mempertahankan mutu".

Menurut Ulber Silalahi (2011:416) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:

"Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara otuput atau apa saja yang sudah dicapai atau hasil sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan".

Pengertian Sistem Perpajakan menurut beberapa ahli diantaranya menurut Siti Resmi (2014:17) mendefinisikan sistem perpajakan sebagai berikut:

"Sistem perpajakan merupakan tata cara perpajakan yang dimaksudkan lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum dan mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan profesional aparatur perpajakan".

Menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:106) mendefinisikan sistem perpajakan sebagai berikut:

"Sistem perpajakan merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk lebih mengefisienkan dan mengefektifkan pemungutan pajak dalam kerangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yang tetap memberikan keadilan dan kepastian hukum

dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian sistem penetapan pajak dapat mendukung upaya pemerintah dalam optimalisasi kebijakan fiskal".

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan adalah gambaran atas tujuan yang telah dicapai dalam hal memberikan keadilan dan kepastian hukum, pelayanan kepada wajib pajak, mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan profesioanlisme aparatur pajak dan keterbukaan admnisitrasi perpajakan.

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem perpajakan dapat dilihat dari pengembangan konsep menurut Siti Resmi (2014:17) sebagai berikut:

1) Keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.
2) Perkembangan di bidang teknologi informasi.
3) Profesionalisme aparatur perpajakan.

2.1.3 Kemauan Membayar Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kemauan Membayar Pajak

Pengertian kemauan membayar pajak menurut beberapa ahli diantaranya menurut Liberty Pandiangan (2014:179) mendefinisikan kemauan membayar pajak sebagai berikut:

"Kemauan membayar pajak merupakan salah satu wujud pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan wajib pajak dengan cara membayar atau menyetor pajak terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Pajak yang dibayar atau disetor selain berupa pajak sendiri dapat juga dari hasil pemotongan atau pemungutan pajak pihak lain".

Menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:101) mendefinisikan kemauan membayar pajak sebagai berikut:

"Kemauan membayar pajak merupakan penjelasan mengenai prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang untuk membayar pajak yang dipengaruhi *tax morale* seperti persepsi adanya kejujuran, sikap membantu atau melayani dari aparat, kepercayaan terhadap instansi pemerintah dan penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak".

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemauan membayar pajak adalah salah satu wujud pelaksanaan kewajiban perpajakan mengenai prinsip-prinsip moral yang diyakini oleh wajib pajak untuk membayar pajak.

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mendorong Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak

Faktor-faktor yang mendorong wajib pajak dalam membayar pajak menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:101) adalah sebagai berikut:

1) Sikap membantu dan melayani dari aparat
2) Kepercayaan terhadap instansi pemerintah
3) Penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:128) menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, dalam dirinya juga memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak.
Menurut Dimas Ramadiansyah (2014) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak cukup dimengerti bagaimana masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak secara berkala bertujuan untuk perkembangan negara secara khususnya pembangunan masyarakat luas. Selain itu semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar pajak.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangatlah diperlukan agar dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Esra Aprilya Sormin (2016) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Semakin besar kesadaran membayar pajak maka akan semakin tinggi tingkat kemauan membayar pajak. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi maka kemauan membayar pajak pun tinggi.

2.2.2 Pengaruh Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:108) menyatakan bahwa apabila sistem perpajakan dapat berjalan dengan efektif, wajib pajak akan berada dalam kondisi yang menyenangkan dan merasakan keuntungan dalam melaksanakan kewajibannya, hal itu mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

Menurut Popi Fauziati dan Arfin Syahri (2015) menyimpulkan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Menurut Esra Aprilia Sormin (2016) menyatakan bahwa persepsi yang baik atas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunujukkan bahwa semakin tinggi persepsi yang baik atas sistem perpajakan pada wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kemauan membayar pajak. Dengan persepsi yang baik atas sistem perpajakan maka dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak tersebut dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya secara benar dan tepat waktu.

Menurut Siti Nurlaela (2014) menyatakan bahwa persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Penggunaan perubahan/pergantian sistem perpajakan memberikan dampak positif terhadap kemauan membayar pajak.

2.3 Hipotesis

Menurut Ulber Silalahi (2012:160) mendefinisikan hipotesis sebagai berikut:

"Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban tentatif atas masalah dan kemudian hipotesis dapat di verifikasi hanya setelah hipotesis diuji secara empiris".

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H_1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

H_2 : Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mendapatkan penjelasan tentang besarnya kebermaknaan (significance) dalam model yang dihipotesiskan sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Berdasarkan hubungan antar variabelnya, yaitu variabel kesadaran wajib pajak dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak, maka jenis dari penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif verikatif.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Ulber Silalahi (2012:120) mendefinisikan operasional sebagai berikut:

> "Operasional merupakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memilki rujukan-rujukan empiris".

Menurut Wiratna Sujarweni dan Poly Endrayanto (2012:23) mendefinisikan variabel sebagai berikut:

> "Variabel adalah sesuatu yang berbentuk yang ditetapkan oleh peneliti dipelajari dengan seksama sehingga diperoleh informasi berupa data dan diolah dengan statistik sehingga dapat ditarik kesimpulan".

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat:

1) Variabel bebas (*independent variable*)
   Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen/bebas (X) terbagi menjadi dua yaitu:
   A. Kesadaran Wajib Pajak
   B. Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan
2) Variabel Terikat
   Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen/terikat (Y) adalah Kemauan Membayar Pajak.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Definisi data primer menurut Wiratna Sujarweni (2015:88) data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

Data Primer dalam penelitian ini adlah hasil jawaban kuisioner yang diisi oleh responden. Responden dari penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya Bandung.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan metode survei menggunakan kuisioner. Menurut Uber Silalahi (2012:296) Kuesioner atau angket satu mekanisme pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara jelas apa yang di syaratkan dan bagaimana mengukur variabel yang

diminati. Satu kuesioner atau angket adalah satu set tulisan tentang pertanyaan yang di formulasi supaya responden mencatat jawabannya, biasanya secara terbuka alternatif jawaban ditentukan.

Hasil dari kuisioner ini disebarkan dilihat dari tingkat kuisioner yang kembali dan dapat dipakai. Persentase dari pengisian kuisioner yang diisi dibandingkan dengan yang disebarkan dikatakan sebagai *respone rate* (tingkat tanggapan responden).

3.4 Populasi, Sampel, Tempat dan Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya yang berjumlah 141.254 orang.

3.4.2 Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya Bandung sebanyak 100 Wajib Pajak.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.4.3.1 Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung yang bertempat di Jalan Peta No. 7, Suka Asih Bojongloa Kaler Bandung**.**

3.4.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Maret 2017 sampai dengan Agustus 2017.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.5.1.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2012: 248) mengemukakan bahwa:

“Validitas instrument ditentukan dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh setiap butir pertanyaan atau pernyataan. Jika skor tiap butir pertanyaan berkorelasi secara signifikan dengan skor total pada tingkat alfa tertentu (misalnya 10%) maka dapat dikatakan bahwa alat pengukur itu valid, dan berlaku sebaliknya. Rumus yang digunakan untuk mencari nilai korelasi adalah korelasi *Pearson Product Moment* “.

3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut Wiratna Sujarweni (2015:110) mendefinisikan uji relibilitas sebagai berikut:

“Uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner”.

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai Alpha > 0,60 maka dinyatakan reliabel.

3.5.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Majalaya Bandung. Pada

penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner yang masing – masing pertanyaan disertai dengan empat kemungkinan jawaban yang harus dipilih oleh responden.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas
2) Uji Multikolinieritas
3) Uji Heteroskedastisitas
4) Uji Autokorelasi

3.5.4 Analisis Liniear Berganda

Menurut Ulber Silalahi, 2012:430) mendefinisikan analisis regresi berganda sebagai berikut:

> "Analisis regresi berganda adalah satu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisa hubungan antara satu variabel dependen *(kriterion)* tunggal dan beberapa variabel-variabel independen *(predicto)*".

Bentuk hubungan fungsional regresi linear berganda menurut Wiratna Sujarweni (2012:88) adalah sebagai berikut:

$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$

Keterangan:

Y = Kemauan Membayar Pajak
α = Konstanta
b = Koefisien regresi untuk variabel X_1 X_2 X_3
X_1 = Kesadaran Wajib Pajak
X_2 = Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

3.5.5 Uji Hipotesis

3.5.5.1 Uji Dua Sisi

Ulber Silalahi (2012:379) mengemukakan uji dua sisi sebagai berikut:

"Uji dua sisi adalah uji hipotesis yang digunakan jika satu hipotesis nol memiliki dua set alternatif yang berbeda. Uji dua sisi menjelaskan bahwa ada satu hubungan atau perbedaan tetapi tidak ada indikasi tentang arah hubungan atau perbedaan tersebut".

3.5.5.2 Uji-t

Imam Ghozali (2012:98) mengemukakan definisi uji t sebagai berikut:

"Uji t adalah uji statistik yang membuktikan perbedaan yang signifikan dalam suatu variabel di antara 2 kelompok. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidaknya masing-masing nilai koefisien regresi secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat".

3.5.6 Koefisien Determinasi

Ulber Silalahi (2012:376) mendefinisikan koefisien determinasi sebaai berikut:

"Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar variasi perubahaan dalam satu variabel (dependen) ditentukan oleh perubahaan dalam variabel

lain (independen). Koefisien determinasi dinyatakan dalam persen (%) sehingga harus dikalikan dengan 100%".

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:
Kd : Koefisien determinasi

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian berkaitan dengan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang disebar kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya Bandung.

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 69,6% dapat dilihat pada **Tabel 4.1** dan berada di antara interval 62,5% - 81,25%. Berdasarkan hasil skor aktual masih terdapat gap sebesar 30,4% (100%-69,6%) yang menunjukan masih terdapat masalah pada Kesadaran Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung.

4.1.1.2 Deskriptif Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan sebesar 77,2% dapat dilihat pada **Tabel 4.2** dan berada di antara interval 62,5%-81,25%. Berdasarkan hasil skor aktual masih terdapat gap sebesar 22,8% (100%-77,2%) yang menunjukan masih terdapat masalah pada Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung.

4.1.1.3 Deskriptif Kemauan Membayar Pajak

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 70,6% dapat dilihat pada **Tabel 4.3** dan berada di antara interval 62,5%-81,25. Berdasarkan hasil skor aktual masih terdapat gap sebesar 25,9% (100%-70,6%) yang menunjukan masih terdapat masalah pada Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi maka dilakukan pengujian statistik secara parsial. Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: pengujian uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien korelasi pearson, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis.

4.1.2.1 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Nilai probabilitas yang di lihat dari nilai Asymp Sig. adalah sebesar 0,983 dan nilai tersebut lebih besar dari 0,1 maka sesuai dengan kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi secara normal.

2. Multikolinearitas

   Dilihat dari besaran *tolerance* (α) dan *variance inflation factor* (VIF) jika menggunakan alpha/tolerance = 10% atau 0,10 maka VIF = 10. Hasil output VIF hitung dari kedua variabel yaitu sebesar 1,055 lebih kecil dari 10 dan semua *tolerance* variabel bebas memiliki nilai sebesar 0,948 = 94,8% lebih besar dari 10%, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan.

3. Heterokedastisitas

   Model regresi yang baik seharusnya terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Secara visual, heteroskedastisitas dapat dideteksi pada grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik tersebar secara acak di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

4. Autokorelasi

   Nilai Durbin-Watson model regresi pada hasil pengolahan sebesar 1,728 dan lebih besar dari batas atas (dU) 1,715 serta kurang dari 4 – 1,715 (4 – dU), maka disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi.

4.1.2.2 Hasil Analisis Linier Berganda

Berdasarkan Hasil koefisien regresi yang diperoleh pada **Tabel 4.4** dapat ditulis dalam bentuk persamaan yang menggambarkan hubungan data X dan Y yang digunakan adalah sebagai berikut:

$Y = 6{,}240 + 0{,}198\ X_1 + 0{,}255\ X_2$

Dimana:

Y = Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

X_1 = Kesadaran Wajib Pajak

X_2 = Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

4.1.2.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

1. Korelasi

   Berdasarkan **Tabel 4.5** dapat dilihat hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi ketika Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan tidak berubah adalah sebesar 0,373, artinya Kesadaran Wajib Pajak memilki hubungan rendah dengan Kemauan Membayar Pajak.

2. Koefisien Determinasi

   Pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar 13,91%, sedangkan sisanya sebesar 86,09% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Uji Hipotesis Parsial (Uji $_t$)

   Berdasarkan **Tabel 4.6** dapat dilihat nilai t_{hitung} untuk Kesadaran Wajib Pajak (X_1) sebesar 3,351. Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 10%, dan derajat kebebasan (df) = 97, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,660. Sehingga dapat disimpulkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,351 > 1,660) dan dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.

4.1.2.4 Pengaruh Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

1. Korelasi

Berdasarkan **Tabel 4.7** dapat dilihat hubungan antara Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi ketika Kesadaran Wajib Pajak tidak berubah adalah sebesar 0,343, artinya Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan memilki hubungan rendah dengan Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak.

2. Koefisien Determinasi

   Pengaruh variabel Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar 11,76%, sedangkan sisanya sebesar 88,24% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Uji Hipotesis Parsial (Uji $_t$)

   Berdasarkan **Tabel 4.8** dapat dilihat nilai t_{hitung} untuk Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X_2) sebesar 2,938. Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 10%, dan derajat kebebasan (df) = 97, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,660. Sehingga dapat disimpulkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,938 > 1,660) dan dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai korelasi antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi ketika Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan tidak berubah yaitu sebesar 0,373, artinya Kesadaran Wajib Pajak memilki hubungan rendah dengan Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap peningkatan Kesadaran Wajib Pajak maka hal tersebut akan meningkatkan Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh sebesar 13,91% terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan sisanya 86,09% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti sikap wajib pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas layanan, dan lain-lain.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 69,6% dengan kriteria tinggi, namun masih terdapat gap sebesar 30,4% yang artinya Kesadaran Wajib Pajak masih terdapat kelemahan. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator wajib pajak membayar jumlah pajak terutang dengan item 3 didapatkan persentase 62,3% dengan kriteria rendah serta dengan item 4 didapatkan persentase 62,0% dengan kriteria rendah yang merupakan masalah yang terjadi pada Kesadaran Wajib Pajak. Selain itu, indikator wajib pajak melaporkan jumlah pajak terutang dengan item 5 didapatkan persentase 61,8% dengan kriteria rendah yang juga merupakan masalah terjadi pada Kesadaran Wajib Pajak.

4.2.2 Analisis Pengaruh Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai korelasi antara Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak Wajib

Pajak Orang Pribadi ketika Kesadaran Wajib Pajak tidak berubah adalah sebesar 0,343 artinya Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan memilki hubungan rendah dengan Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap peningkatan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan maka hal tersebut akan meningkatkan Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan memberikan pengaruh sebesar 11,76%% terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan sisanya 88,24% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti sikap wajib pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas layanan, dan lain-lain.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 77,2 dengan kriteria tinggi, namun masih terdapat gap sebesar 22,8% yang artinya Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan masih terdapat kelemahan. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator kemajuan di bidang teknologi informasi dengan item 13 didapatkan persentase 62,3% dengan kriteria buruk yang merupakan masalah yang terjadi pada Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 13,91%. Terdapat hubungan yang bersifat positif artinya, setiap peningkatan Kesadaran Wajib Pajak maka hal tersebut akan meningkatkan Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan begitupun sebaliknya. Semakin tinggi tingkat Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 11,76%. Terdapat hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan maka hal tersebut akan meningkatkan Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan begitupun sebaliknya. Semakin tinggi Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan pada wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

1. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sebaiknya KPP Pratama Majalaya Bandung lebih memperhatikan faktor-faktor apa saja yang membuat wajib pajak sadar untuk membayar dan melaporkan pajak. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memberikan penyuluhan agar meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai fungsi pajak, cara menghitung pajak dengan benar, membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Dengan adanya penyuluhan dan pengetahuan yang benar diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya Bandung untuk memiliki kemauan membayar pajak.
2. Dalam permasalahan terkait kemajuan teknologi di bidang perpajakan yang dirasakan wajib pajak seperti pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-filing*, petugas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya Bandung dapat menghimbau wajib pajak agar melaporkan pajak menggunakan *e-SPT* dan *e-filing* dengan tujuan dapat

memudahkan wajib pajak. Hal itu bisa dilakukan dengan sosialisasi dan memberikan penyuluhan yang dapat membantu wajib pajak yang belum memahami *e-SPT* dan *e-filing* dari proses awal pendaftaran sampai wajib pajak paham bagaimana melaporkan pajak menggunakan *e-SPT* dan *e-filing*. Selain itu diperlukan sistem yang lebih efektif sehingga dapat menjaga kerahasiaan data wajib pajak.

5.2.2 Saran Akademis

1) Bagi Perkembangan Ilmu
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menambah informasi yang terbaru bagi perkembangan ilmu akuntansi keuangan khususnya mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
2) Bagi Peneliti Lain
   Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan dengan standar pengukuran yang berbeda dari penelitian ini, serta diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain selain Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, karena terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi seperti sikap wajib pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas layanan, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

Adinur Prasetyo. 2016. Konsep dan Analisis Rasio Pajak. Jakarta: Elex Media Komputindo

Darsono dan Tjatjuk Siswandoko. 2011. Sumber Daya Manusia Abad 21. Jakarta: Nusantara Consulting

Dimas Ramadiansyah. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajibannya. Jurnal e-perpajakan. Vol.1 No.1

Erly Suandy. 2011. Hukum Pajak Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat

Esra Aprilia Sormin. 2016. Pengaruh Persepi Baik atas Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak: Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Dumai. JOM Fekon Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016

Fiki Ariyanti. 2015. Wajib Pajak Masih Takut Lapor SPT Pakai E-Filling. Liputan6.com. (online). (http://bisnis.liputan6.com/read/2195350/wajib-pajak-masih-takut-lapor-spt-pakai-e-filing. 23/03/17)

Ghalih Huriarto. 2015. Kesadaran Wajib Pajak di Bandung Rendah. Republika.co.id.(online).(http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/03/06/mj8zxc-kesadaran-wajib-pajak-di-bandung-rendah. 23/03/17)

Herry Susanto. 2012. Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak. Pajak.go.id. (online). (http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak. 23/03/17)

Imam Ghozali. 2012. Aplikasi Analisis Mulitvariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Liberty Pandiangan. 2014. Administrasi Perpajakan (Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia). Jakarta: Erlangga

Manahan P Tampubolon. 2012. Perilaku Keorganisasian (Organizational behaviour). Bogor: Ghalia Indonesia

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: ANDI

Popi Fauziati dan Arfin Syahri. 2015. Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. Vol.8 No.1 (April) 2015

Reni Maesaroh. 2015. Analisis atas Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak: Survey pada Wajib Pajak Orang

Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kota Cianjur. Universitas Komputer Indonesia. Hal 2
Siti Nurlaela. 2014. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayara Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Jurnal Paradigma. Vol. 11 No.2 ISSN: 1693-0827 Universitas Islam Batik Surakarta
Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 8) Buku 1. Jakarta: Salemba empat
Suci S Utami. 2015. Sistem Administrasi Rumit, Bikin Orang Malas Bayar Pajak. Metrotvnews.com.(online).(http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/03/29/378212/sistem-administrasi-rumit-bikin-orang-malas-bayar-pajak. 23/03/17)
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
Tanza Erlambang. 2016. Apa? Jutaan Perusahaan Tak Bayar Pajak, Penyebab Target Meleset. Kompasiana.com. (online). (http://www.kompasiana.com/terlambang/apa-jutaan-perusahaan-tak-bayar-pajak-penyebab-target-meleset_569fea48bc22bdbf06b8b784. 23/03/17)
Timbul H Simanjuntak dan Imam Mukhlis. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Bogor: Raih Asa Sukses
Ulber Silalahi. 2011. Asas-Asas Manajemen. Bandung: Refika Aditama
Ulber Silalahi. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama
Wahid Nursalim. 2011. Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Pajak dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong, Kebumen. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Wibowo. 2013. Perilaku Dalam Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo
Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas. Sinopsium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto
Wiratna Sujarweni dan dan Poly Endrayanto. 2012. Statistika Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu
Wiratna Sujarweni. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
Yuliardi Putro. 2015. Kesadaran Bayar Pajak Orang RI Masih Rendah. Liputan6.com.(online).(http://bisnis.liputan6.com/read/2230303/kesadaran-bayar-pajak-orang-ri-masih-rendah. 23/03/17)

Daftar Tabel

Tabel 4.1
Persentase Skor Jawaban Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No.	Indikator	Butir Pernyataan	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kriteria
1.	Wajib pajak menghitung jumlah pajak terutang.	Item 1	258	400	64,5%	Tinggi
		Item 2	308	400	77,0%	Tinggi
2.	Wajib pajak membayar jumlah pajak terutang.	Item 3	249	400	62,3%	Rendah
		Item 4	248	400	62,0%	Rendah
3.	Wajib pajak melaporkan jumlah pajak terutang	Item 5	247	400	61,8%	Rendah
		Item 6	265	400	66,3%	Tinggi
4.	Wajib pajak mempertanggung jawabkan penghitungan pajak	Item 7	318	400	79,5%	Tinggi
		Item 8	334	400	83,5%	Tinggi
Total			**2.227**	**3.200**	**69,6%**	**Tinggi**

Sumber : Data olah hasil kuisioner 2017 (terlampir)

Tabel 4.2
Persentase Skor Jawaban Responden Variabel Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

No.	Indikator	Butir Pernyataan	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kriteria
1.	Informasi	Item 9	334	400	83,5%	Sangat Baik
2.	Tujuan	Item10	335	400	83,8%	Sangat Baik
3.	Keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak	Item 11	282	400	70,5%	Baik
		Item 12	306	400	76,5%	Baik
4.	Kemajuan di bidang teknologi informasi	Item 13	249	400	62,3%	Buruk
		Item 14	287	400	71,8%	Baik
5.	Profesionalisme aparatur perpajakan	Item 15	341	400	85,3%	Sangat Baik
		Item 16	337	400	84,3%	Sangat Baik
Total			**2.471**	**3.200**	**77,2%**	**Tinggi**

Sumber : Data olah hasil kuisioner 2017 (terlampir)

Tabel 4.3
Persentase Skor Jawaban Responden Variabel Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

No.	Indikator	Butir Pernyataan	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kriteria
1.	Pelayanan dari aparatur pajak	Item 17	323	400	80,8%	Tinggi
		Item 18	317	400	79,3%	Tinggi
2.	Kepercayaan terhadap instansi pemerintah	Item 19	249	400	62,3%	Tinggi
		Item 20	248	400	62,0%	Rendah
3.	Rasa hormat dari aparatur pajak	Item 21	263	400	65,8%	Rendah
		Item 22	295	400	73,8%	Tinggi
Total			**1.695**	**2.400**	**70,6%**	**Tinggi**

Sumber : Data olah hasil kuisioner 2017 (terlampir)

Tabel 4.4
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.240	2.257		2.765	.007
	Kesadaran_Wajib_Pajak	.198	.059	.311	3.351	.001
	Persepsi_Atas_Efektivitas_ Sistem_Perpajakan	.255	.087	.272	2.938	.004

Tabel 4.5
Hasil Korelasi Pearson Kesadaran Wajib Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak

Wajib Pajak Orang Pribadi

Correlations

		Kesadaran_ Wajib_Pajak	Kemauan_Membayar_Pajak_Wajib_Pajak_Orang_Pribadi
Kesadaran_Wajib_Pajak	Pearson Correlation	1	.373**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	100	100
Kemauan_Membayar_Pajak_Wajib_Pajak_Orang_Pribadi	Pearson Correlation	.373**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4.6
Hasil Uji Hipotesis Parsial Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.240	2.257		2.765	.007
	Kesadaran_Wajib_Pajak	.198	.059	.311	3.351	.001
	Persepsi_Atas_Efektivitas_Sistem_Perpajakan	.255	.087	.272	2.938	.004

a. Dependent Variable: Kemauan_Membayar_Pajak_Wajib_Pajak_Orang_Pribadi

Tabel 4.7

Hasil Korelasi Pearson Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Correlations

		Persepsi_Atas_ Efektivitas_Sistem_ Perpajakan	Kemauan_Membayar_P ajak_Wajib_Pajak_Oran g_Pribadi
Persepsi_Atas_Efektivitas_Sistem_Pe rpajakan	Pearson Correlation	1	.343**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	100	100
Kemauan_Membayar_Pajak_ Wajib_Pajak_Orang_Pribadi	Pearson Correlation	.343**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4.8
Hasil Uji Hipotesis Parsial Pengaruh Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.240	2.257		2.765	.007
	Kesadaran_Wajib_Pajak	.198	.059	.311	3.351	.001
	Persepsi_Atas_Efektivitas_ Sistem_Perpajakan	.255	.087	.272	2.938	.004

a. Dependent Variable: Kemauan_Membayar_Pajak_Wajib_Pajak_Orang_Pribadi